



EKONOMI POLITIK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: STUDI KASUS KEBIJAKAN *PUBLISHER RIGHTS* AUSTRALIA TERHADAP GOOGLE DAN FACEBOOK

Sirwan Yazid Bustami

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

Surel: sirwan@unram.ac.id

Tanggal pengiriman: 9 Januari 2024 | Tanggal revisi: 7 Maret 2024 | Tanggal diterima: 20 Maret 2024

ABSTRACT

Australian news media publishers are facing serious challenges as Google and Facebook emerge as digital platforms in the Australian media industry. They have transformed into the main pillars of media industry as they monopolize distribution and monetization of news content as well as the digital advertising market, thus dominate Australia's digital market share. Their power and dominance in controlling the flow of information and digital advertising have drawn attention of the Australian government. In response, the Australian government enacted the publisher rights policy through adoption of the News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code (NMBC). Google and Facebook reacted strongly against the NMBC and threatened to close the services in Australia. This research aims to explain the reasons behind Australia's enactment of the publisher rights policy against Google and Facebook. Using the analytical descriptive research methods combined with theory of regulatory mercantilism, concept of digital sovereignty, and concept of intellectual property rights, this study argues that enactment of the publisher rights policy is due to the imbalance of bargaining power between the Australian news media publishers and Google and Facebook. In addition, this policy was enacted due to the reduction in traditional revenue received by the traditional news media publishers as a result of declining advertising revenue, content purchases, and subscriptions that pose a threat to sustainability of Australia's news media industry. Lastly, the adoption of the publisher rights policy is due to the centralized media power of Google and Facebook which endangers diversity of Australian news media.

Keywords: Publisher Rights Policy, News Media Publishers, Australian Government, Google, Facebook

ABSTRAK

Penerbit media berita Australia menghadapi tantangan serius seiring kemunculan Google dan Facebook sebagai platform digital dalam industri media di Australia. Mereka bertransformasi menjadi pilar utama dalam industri media karena memonopoli distribusi dan monetisasi konten berita serta pasar iklan digital sehingga menguasai pangsa pasar digital Australia. Kekuasaan dan dominasi mereka dalam mengendalikan aliran informasi dan iklan digital telah menarik perhatian pemerintah Australia. Merespons permasalahan ini, pemerintah Australia memberlakukan kebijakan *publisher rights* melalui adopsi *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (NMBC). Google dan Facebook bereaksi menentang keras NMBC dan mengancam menutup layanan di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dipadukan dengan teori *regulatory mercantilism*, konsep *digital sovereignty*, dan konsep *intellectual property rights*,

penelitian ini berargumen bahwa pemberlakuan kebijakan *publisher rights* disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook. Selain itu, kebijakan ini diberlakukan oleh karena berkurangnya pendapatan tradisional yang diterima oleh penerbit media berita tradisional akibat penurunan pendapatan iklan, pembelian konten, dan langganan yang mengancam kelangsungan industri media berita Australia. Terakhir, adopsi kebijakan *publisher rights* disebabkan oleh kekuasaan media yang tersentralisasi pada Google dan Facebook yang mengancam keberagaman media berita Australia.

Kata Kunci: Kebijakan *Publisher Rights*, Penerbit Media Berita, Pemerintah Australia, Google, Facebook

LATAR BELAKANG

Pada 25 Februari 2021, pemerintah Australia memberlakukan kebijakan *publisher rights* terhadap Google dan Facebook setelah *Australian House of Representatives* dan *Australian Senate* pada 17 Februari 2021 dan 24 Februari 2021 secara bergiliran mengesahkan undang-undang (UU) yang disebut sebagai *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (NMBC). Inisiatif pembentukan NMBC bermula pada Desember 2017 ketika *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) melakukan penyelidikan yang tertuang dalam *Digital Platforms Inquiry* (DPI), yang menyoroti monopoli pasar digital oleh Google dan Facebook serta dampaknya terhadap persaingan dalam industri media dan periklanan di Australia. Hasil penyelidikan ACCC menyimpulkan bahwa kedua platform digital tersebut memiliki kekuatan pasar yang dominan dalam memonopoli distribusi informasi dan iklan digital serta berdampak negatif pada penurunan pendapatan penerbit media berita akibat hilangnya pemasukan iklan yang beralih kepada kedua platform digital tersebut (ABC News, 2019; BBC News, 2021b; Flew et al., 2023).

ACCC menggarisbawahi pentingnya reformasi platform digital melalui adopsi UU baru yang mengatur hubungan antara platform digital dengan penerbit media berita. Maka dari itu, ACCC merekomendasikan untuk mengenakan regulasi kepada kedua platform digital tersebut guna melakukan pengawasan ketat terhadap algoritma dan transparansi dalam proses peringkat konten. Selain itu, ACCC juga merekomendasikan untuk memperkuat hukum persaingan di sektor industri media

dan periklanan, termasuk membatasi akuisisi yang tidak terkendali oleh platform digital besar seperti Google dan Facebook guna memastikan keadilan dan kelangsungan media tradisional. Oleh karena itu, ACCC menganjurkan pemerintah Australia memberlakukan UU yang memungkinkan negosiasi antara platform digital dan penerbit media berita terkait pembayaran konten berita. Menanggapi rekomendasi ACCC, pada April 2020 pemerintah Australia memerintahkan ACCC menyusun draf rancangan undang-undang (RUU) yang selanjutnya disebut sebagai NMBC. Draft ini diajukan oleh pemerintah Australia ke Parlemen untuk disahkan sebagai UU yang mengatur kode etik yang wajib ditaati oleh platform digital, terutama Google dan Facebook dalam berbisnis di Australia (BBC News, 2021a; Flew & Wilding, 2021).

Google dan Facebook bereaksi keras menentang kebijakan *publisher rights* sebagaimana diatur dalam NMBC karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak adil dalam pasar bebas. Mereka menilai kebijakan ini kontraproduktif karena mengancam model bisnis mereka yang mengandalkan konten berita dari penerbit media berita untuk menarik pengguna ke platform mereka. Google mengancam menghentikan layanan pemberitaan di Australia. Mereka mengklaim memberikan manfaat signifikan bagi penerbit media berita Australia dengan mengarahkan lalu lintas pengguna ke situs-situs berita. Sementara Facebook memblokir layanan pemberitaan di platform mereka di Australia. Mereka menilai telah memberikan nilai tambah bagi penerbit media berita Australia dengan mengarahkan lalu lintas pengguna ke situs-situs berita. Facebook juga mengklaim meluncurkan program Facebook News di beberapa negara di dunia untuk membantu mendukung penerbit media berita dengan membayar konten berkualitas yang dipublikasikan di platform mereka. Kebijakan ini dituding mengarah pada perselisihan hukum yang lebih jauh antara pemerintah Australia dan perusahaan teknologi (BBC News, 2021b; Bossio et al., 2022; Dwyer et al., 2023; Flew, 2023; Heylen, 2023).

Selain menuai resistensi dari Google dan Facebook, kebijakan *publisher rights* juga menuai polemik di ranah publik Australia. Publik mengkhawatirkan kebijakan ini dapat membatasi kebebasan berekspresi, mengganggu kebebasan pers, membatasi konten pemberitaan, dan bahkan membuka peluang bagi sensor. Apabila platform digital seperti Google dan Facebook dikenakan biaya yang tinggi, mereka mungkin akan mengurangi jumlah berita yang ditampilkan atau bahkan menutup layanan pemberitaan sehingga pada akhirnya dapat menghambat akses terhadap informasi. Di sisi lain, platform digital menilai bahwa kebijakan ini memaksa mereka untuk membayar konten berita yang pada akhirnya mengurangi nilai tambah yang diberikan kepada pengguna (BBC News, 2021b; Bossio et al., 2022).

Kontroversi muncul karena kebijakan ini dianggap memaksa platform digital seperti Google dan Facebook membayar konten berita tanpa memperhitungkan manfaat besar yang diberikan kepada penerbit media berita melalui peningkatan lalu lintas dan visibilitas. Respons kebijakan Google dan Facebook berdampak negatif pada keterbatasan akses pengguna terhadap platform ini sebagai sumber berita utama, terutama bagi kelompok masyarakat di Australia yang bergantung pada platform tersebut untuk mengakses berita dan informasi. Lebih jauh, kedua platform digital tersebut khawatir bahwa kebijakan semacam ini dapat membuka pintu bagi negara-negara lain untuk mengadopsi pendekatan serupa (BBC News, 2021b; Bossio et al., 2022; Dwyer et al., 2023; Meade, 2021b).

Berdasarkan elaborasi latar belakang di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian, yakni “Mengapa Australia memberlakukan kebijakan *publisher rights* terhadap Google dan Facebook?”. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia melalui adopsi NMBC terhadap Google dan Facebook. Argumen utama yang diajukan oleh penelitian ini adalah pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar

antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook, kelangsungan industri media berita Australia, dan keberagaman media berita Australia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Pelbagai literatur akademis mengulas kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook. *Pertama*, tulisan K.B. Heylen berjudul “*Enforcing Platform Sovereignty: A Case Study of Platform Responses to Australia’s News Media Bargaining Code*” membahas mengenai respons platform digital terhadap pengaturan NMBC. Heylen menganalisis perilaku platform digital seperti Facebook dan Google terhadap pembuatan dan penerapan NMBC serta implikasi lebih lanjut terhadap kedaulatan *platform digital* (Heylen, 2023). *Kedua*, Tai Neilson dan K.B. Heylen dalam tulisan mereka yang berjudul “*Journalism Unions and Digital Platform Regulation: A Critical Discourse Analysis of Submissions to Australia’s News Media Bargaining Code*” menganalisis peran serikat jurnalis dalam mengadvokasi regulasi platform digital dan memperkuat perundingan NMBC dalam mengatur hubungan antara media berita tradisional dan platform digital seperti Facebook dan Google (Neilson & Heylen, 2023).

Ketiga, Terry Flew dan Derek Wilding dalam tulisan mereka yang berjudul “*The Turn to Regulation in Digital Communication: The ACCC’s Digital Platforms Inquiry and Australian Media Policy*” menganalisis pergeseran kebijakan media di Australia yang cenderung mengatur platform-platform digital dalam komunikasi digital untuk memastikan persaingan yang adil dan melindungi kepentingan media tradisional sembari mempertimbangkan kompleksitas teknologi dan kebebasan berbicara (Flew & Wilding, 2021). *Keempat*, Diana Bossio *et al.* dalam tulisan mereka yang berjudul “*Australia’s News Media Bargaining Code and the Global Turn Towards Platform Regulation*” menganalisis regulasi terhadap platform digital di Australia serta tren

global yang mengarah ke regulasi platform secara umum. Bossio *et al.* berargumen bahwa NMBC dan kebijakan serupa di negara-negara lain menunjukkan adanya kebutuhan universal untuk memastikan bahwa platform digital besar memberikan kontribusi yang adil kepada penerbit media berita dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk industri media secara keseluruhan (Bossio et al., 2022).

Terakhir, Benedetta Brevini dalam tulisan berjudul “*Global Digital Lords and Privatisation of Media Policy: The Australian Media Bargaining Code*” menganalisis peran dan dampak dominasi perusahaan teknologi digital global di industri media terhadap kebijakan media serta konsekuensi dari privatisasi kebijakan media. Brevini menjelaskan upaya pemerintah Australia dalam mengatasi isu ini melalui NMBC di tengah kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas pemberlakuan UU ini (Brevini, 2023).

Berdasarkan uraian literatur akademis di atas, berbagai topik penelitian dibahas menyangkut kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook. Namun demikian, penelitian ini berupaya untuk mengungkap alasan di balik pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook yang dianggap kontroversial dan menuai polemik secara domestik di Australia serta merugikan kedua raksasa teknologi tersebut menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional.

Kerangka Teoretis dan Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, penulis menggunakan tiga kerangka berpikir, yakni teori *regulatory mercantilism*, konsep *digital sovereignty*, dan konsep *intellectual property rights* (IPRs). Ketiga kerangka berpikir tersebut digunakan untuk mengungkap alasan di balik pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook.

Teori *Regulatory Mercantilism*

Regulatory mercantilism merupakan teori ekonomi politik internasional yang menggabungkan prinsip-prinsip dari merkantilisme dan regulasi pemerintah dalam sistem perdagangan internasional. Teori ini kerap kali diasosiasikan dengan praktik proteksionisme dan intervensionisme dalam perdagangan internasional. Teori ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan UU dan regulasi pemerintah dalam melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional.

Negara-negara yang mengadopsi pendekatan ini menggunakan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan industri domestik dari kompetisi asing yang dianggap tidak adil atau merugikan; mendorong perkembangan sektor-sektor strategis; dan meningkatkan keseimbangan perdagangan. Instrumen regulasi dan kebijakan yang seringkali digunakan antara lain, yakni kebijakan tarif, subsidi, hambatan regulasi, pembatasan investasi asing, dan kebijakan keamanan. Adapun prinsip utama *regulatory mercantilism*, yakni proteksionisme perdagangan, subsidi, regulasi ketat, dan intervensionisme ekonomi.

Pertama, proteksionisme perdagangan. Negara berupaya melindungi industri domestik dari persaingan internasional yang tidak adil. Mereka menerapkan berbagai hambatan perdagangan seperti tarif impor yang tinggi, kuota perdagangan, atau pengaturan teknis yang ketat untuk mencegah masuknya produk impor yang dapat mengancam industri domestik. *Kedua*, subsidi. Negara memberikan subsidi kepada industri domestik untuk meningkatkan daya saing. Subsidi ini dapat berbentuk insentif pajak, dana penelitian dan pengembangan, atau bantuan finansial langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan industri domestik.

Ketiga, regulasi ketat. Negara menerapkan berbagai peraturan dan regulasi yang membatasi akses dan kegiatan perusahaan asing di pasar domestik. Regulasi ini dapat berupa persyaratan lisensi, persyaratan pembelian lokal, atau persyaratan konten lokal. Tujuannya adalah untuk melindungi industri domestik dari pesaing asing dan mendorong investasi domestik. *Keempat*, intervensionisme ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dalam mengendalikan ekonomi daripada pasar bebas. Lebih jauh, pemerintah secara aktif terlibat dalam mengarahkan investasi, mengatur harga, dan menentukan kebijakan moneter dan fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu, seperti menciptakan lapangan kerja atau mengurangi kesenjangan ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam *regulatory mercantilism* adalah perlindungan kekayaan intelektual. Negara dianjurkan memperkuat UU hak kekayaan intelektual untuk melindungi inovasi dan teknologi dalam negeri dari pencurian dan penyalahgunaan oleh negara lain. Mereka juga dapat memberikan subsidi dan insentif bagi perusahaan yang bergerak di sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi (Farrand, 2023).

Selain itu, *regulatory mercantilism* juga menekankan pentingnya pengaturan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan regulasi dan hukum yang kuat dalam mengatur dan mengontrol praktik bisnis, termasuk melarang monopoli (kartel) dan memastikan kondisi persaingan yang adil. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis terlibat dalam persaingan yang sehat dan adil sehingga tidak terjadi praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan kepentingan nasional.

Teori ini juga menganjurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggunakan instrumen regulasi seperti aturan perdagangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, subsidi industri, dan pembatasan impor. Tujuannya adalah melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi negara,

termasuk industri strategis, dan lapangan kerja. Selain itu, negara-negara yang menganut teori ini cenderung menggunakan instrumen regulasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk-produk domestik mereka di pasar global (Farrand & Carrapico, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook ditujukan sebagai upaya pemerintah Australia mengatur dan mengendalikan praktik bisnis tidak adil yang merugikan kepentingan nasional melalui kebijakan regulasi dan hukum yang kuat sehingga tercipta keseimbangan kekuatan tawar-menawar antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook.

Konsep *Digital Sovereignty*

Konsep *digital sovereignty* mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan ruang digital serta informasi yang berada di dalamnya melalui penggunaan kebijakan, regulasi, dan teknologi untuk menjaga otonomi negara. Ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dalam hal teknologi informasi, infrastruktur digital, dan data yang dihasilkan oleh pengguna di wilayahnya.

Selain itu, konsep ini menekankan pentingnya negara memiliki kemampuan untuk mengelola dan melindungi data mereka sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Hal ini berarti bahwa setiap negara memiliki kontrol penuh atas data dan informasi yang dihasilkan dan dikirim melalui infrastruktur digital di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada teknologi asing dan mencegah kebocoran atau pencurian data yang dapat membahayakan kepentingan nasional (Bellanova et al., 2022; Calderaro & Blumfelde, 2022).

Lebih jauh, konsep ini melibatkan beberapa elemen penting, yakni regulasi dan kebijakan, infrastruktur digital, pengelolaan data, ekonomi digital, dan keamanan

siber. *Pertama*, regulasi dan kebijakan. Negara harus memiliki kebijakan dan UU yang mengatur penggunaan data dan informasi. Mereka harus melindungi data yang sensitif, mencegah manipulasi informasi, dan membatasi akses oleh pihak asing yang mungkin ingin mengambil alih atau merusak infrastruktur digital. *Kedua*, infrastruktur digital. Negara harus memiliki infrastruktur digital yang kuat dan aman untuk memastikan bahwa data dan informasi tetap berada di dalam batas negara. Ini dapat mencakup pembangunan pusat data nasional, peningkatan kapabilitas keamanan siber, dan penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi informasi yang dikirim dan diterima.

Ketiga, pengelolaan data. Negara harus memiliki kontrol penuh atas data yang dihasilkan oleh warganya atau data yang berada di dalam wilayah mereka. Pemerintah harus dapat mengatur dan mengendalikan pengumpulan, penggunaan, dan penghapusan data agar sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai nasional. *Keempat*, ekonomi digital. Negara harus mempromosikan ekonomi digital yang berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri teknologi di dalam negeri dan membatasi pengaruh dan monopoli perusahaan teknologi asing yang dapat membahayakan kepentingan ekonomi nasional. Selain itu, negara juga dapat mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan ekonomi digital dalam batas-batas hukum dan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini termasuk regulasi terkait perdagangan elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengaturan *e-commerce*. *Kelima*, keamanan siber. Negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi infrastruktur digital dan data dari ancaman siber seperti serangan *hacker*, *malware*, dan kegiatan spionase asing. Hal ini mencakup pengembangan kemampuan tanggap dan perlindungan kejahatan siber serta kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman ini (Monsees & Lambach, 2022; Zhang & Morris, 2023).

Secara umum, konsep *digital sovereignty* bertujuan untuk memberdayakan negara dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan terhubung secara

global. Dengan memiliki kontrol penuh atas data dan informasi mereka sendiri, negara dapat melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan digital mereka. Di era digital yang terus berkembang, negara-negara semakin menyadari pentingnya mempertahankan kedaulatan mereka terhadap ruang digital untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan, ekonomi, dan budaya (Glasze et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook ditujukan sebagai upaya pemerintah Australia menjaga kedaulatan digital dengan mengatur dan mengendalikan penggunaan data dan informasi yang didistribusikan oleh Google dan Facebook di *platform* mereka agar tidak membahayakan kepentingan nasional.

Konsep *Intellectual Property Rights*

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus masalah kekayaan intelektual global, konsep *intellectual property rights* (IPRs) merujuk pada hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya intelektual atau pencipta sebagai pengakuan dan perlindungan atas karya atau penciptaan mereka. Hak ini meliputi hak ekonomi dan moral yang melindungi berbagai jenis karya intelektual, seperti karya-karya kreatif, penemuan, inovasi, desain, dan merek dagang yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan (Lu, 2007).

WIPO mengakui bahwa IPRs adalah bagian integral dari sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi inovasi, kreativitas, dan pengetahuan. Konsep ini mencakup beberapa jenis IPRs, antara lain: hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. *Pertama*, hak cipta (*copyright*). Hak ini melindungi karya-karya seperti buku, musik, film, program komputer, dan karya artistik lainnya. Pemilik hak cipta

memiliki eksklusivitas atas reproduksi, distribusi, pameran, dan penampilan karya tersebut. *Kedua*, hak paten (*patents*). Hak ini memberikan eksklusivitas kepada pemilik untuk melindungi penemuan atau inovasi baru yang mempunyai manfaat teknis. Hal ini meliputi proses, perangkat, produk, atau komposisi yang baru dan berguna. Paten memberikan hak kepada pemilik untuk mencegah orang lain menggunakan, membuat, menjual, atau mengimpor penemuan tersebut tanpa izin.

Ketiga, hak merek (*trademarks*). Hak ini melindungi nama, logo, atau lambang yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu. Ini memberikan pemilik merek hak eksklusif dalam penggunaan dan perlindungan merek dagang mereka. *Keempat*, hak desain industri (*industrial designs*). Hak ini melindungi penampilan visual dan estetika produk industri, seperti desain produk, bentuk, pola, atau ornamentasi. Ini termasuk elemen desain yang memberikan kesan estetika tertentu atau memberikan manfaat fungsional. *Kelima*, hak rahasia dagang (*trade secrets*). Hak ini melindungi informasi atau formula rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan penting bagi suatu perusahaan. Ini termasuk metode produksi, teknik, resep, atau informasi bisnis sensitif lainnya. Rahasia dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain (Davis, 2004).

Tujuan utama perlindungan IPRs adalah memberikan insentif bagi para pencipta dan inovator untuk melanjutkan karya mereka dan mendorong inovasi berkelanjutan. Dengan memberikan hak eksklusif, pemilik IPRs dapat menikmati manfaat ekonomi atas karya-karya mereka dan mencegah penggunaan, penyalinan, atau eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin. Konsekuensi dari pemegang IPRs adalah memungkinkan mereka untuk mengendalikan penggunaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual mereka, serta memberikan insentif bagi inovasi, kreativitas, dan penemuan baru. Perlindungan IPRs juga membantu menciptakan ekonomi yang adil dan berkeadilan, di mana pencipta dan inovator mendapatkan

imbalan yang layak atas karya intelektual mereka, meningkatkan investasi, dan pengembangan lebih lanjut (Oberrecht, 1997; Shadlen, 2007).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook ditujukan sebagai upaya pemerintah Australia melindungi hak cipta atas penggunaan konten penerbit media berita Australia oleh Google dan Facebook di platform mereka.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang ditujukan untuk menjelaskan alasan di balik pemberlakuan kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook (Creswell & Creswell, 2022). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pengumpulan data diperoleh dari sumber sekunder, yakni jurnal, laporan, situs resmi, dan sumber internet lainnya. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan untuk dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan tahap penyajian data dalam bentuk narasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada elaborasi teori *regulatory mercantilism*, konsep *digital sovereignty*, dan konsep *intellectual property rights* (IPRs).

DISKUSI

Kebijakan *publisher rights* Australia terhadap Google dan Facebook menuai polemik di ranah publik di Australia. Bahkan kebijakan ini ditentang keras oleh kedua raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut. Namun pemerintah Australia bersikeras memberlakukan kebijakan ini dengan mengadopsi *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (NMBC) sebagai panduan regulasi dan kebijakan dalam melindungi industri media berita Australia dari dominasi platform digital besar

seperti Google dan Facebook di era disrupsi digital. Pemberlakuan kebijakan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook, kelangsungan industri media berita Australia, dan keberagaman media berita Australia.

Ketidakseimbangan Kekuatan Tawar-Menawar antara Penerbit Media Berita Australia dengan Google dan Facebook

Pemberlakuan kebijakan *publisher rights* melalui adopsi NMBC disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar dalam bisnis penerbitan berita antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook. Ketidakseimbangan ini dipicu oleh dua faktor, yakni dominasi Google dan Facebook dalam distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita Australia serta dominasi mereka dalam pasar iklan digital. Dominasi ini menciptakan praktik bisnis yang tidak adil sehingga mengancam ekosistem bisnis penerbitan berita di Australia. Melalui kebijakan ini, pemerintah Australia berupaya menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara penerbit media berita dan platform digital dalam hal penggunaan konten dan pemasaran iklan (Khadem, 2019).

Google dan Facebook memonopoli distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita Australia. Platform digital seperti Google dan Facebook telah menjadi sumber utama pemberitaan bagi banyak orang di seluruh dunia tanpa terkecuali di Australia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah pengguna yang sangat besar di Australia sehingga sebagian besar mengandalkan akses pemberitaan melalui platform digital seperti Google dan Facebook untuk memperoleh informasi terbaru dengan mudah dan cepat. Mereka memanfaatkan konten penerbit media berita secara gratis demi menarik pengguna ke platform digital mereka dengan cara menampilkan cuplikan berita atau artikel dan tautan menuju publikasi asli dalam hasil pencarian atau di *feed* berita tanpa memberikan kompensasi yang memadai kepada penerbit media berita.

Hal ini menyebabkan penerbit media berita tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan konten mereka di platform tersebut (BBC News, 2021b; Flew et al., 2023).

Dominasi Google dan Facebook juga terlihat jelas dari monopoli atas pasar iklan digital di Australia. Pada tahun 2020, Google meraup keuntungan sebesar 4,4 miliar USD dari pasar iklan digital Australia. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,3 miliar USD dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,1 miliar USD (Grueskin, 2022). Struktur pasar monopolistik seperti ini merugikan karena berdampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan iklan yang diperoleh oleh penerbit media berita Australia. Mereka mengandalkan pendapatan iklan sebagai sumber utama pemasukan. Namun, seiring meningkatnya popularitas platform digital seperti Google dan Facebook, sebagian besar pengiklan beralih ke platform tersebut dengan mempertimbangkan penawaran target pasar yang lebih luas serta kemampuan pengukuran yang lebih akurat. Hal ini menjadikan kedua platform tersebut memperoleh porsi yang besar dari pendapatan periklanan digital di Australia. Situasi semacam ini merugikan industri media berita karena berkurangnya pendapatan iklan yang diperoleh oleh penerbit media berita. Akibatnya, banyak penerbit media berita mengalami kesulitan dari sisi keuangan serta tidak mampu bertahan di era disrupsi digital (CBC News, 2020; Morrison, 2021).

Merespons Google dan Facebook atas monopoli distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita serta pasar iklan digital di Australia, pemerintah Australia memberlakukan kebijakan *publisher rights* demi melindungi kepentingan penerbit media berita Australia. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi persoalan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook dalam ekosistem bisnis industri media berita di Australia. Pemerintah berusaha agar penerbit media berita memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih seimbang dan saling menguntungkan dalam bernegosiasi

dengan kedua platform digital tersebut. Maka dari itu, kebijakan ini berupaya menyeimbangkan kekuatan tawar-menawar dengan meregulasi praktik bisnis yang adil dalam industri media berita di Australia. Melalui kebijakan ini, pemerintah Australia berupaya membatasi dominasi kedua platform digital tersebut dengan cara menerapkan regulasi dan kebijakan atas kontrol distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita, transparansi pembayaran dan pendapatan monetisasi konten penerbit media berita, dan kompensasi keuangan atas penggunaan konten penerbit media berita (BBC News, 2021b; Packham, 2020).

Pertama, kontrol atas distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita. Melalui regulasi dan kebijakan ini, pemerintah Australia mewajibkan Google dan Facebook membentuk perjanjian tawar-menawar yang adil dengan penerbit media berita terkait kompensasi atas penggunaan konten berita. Jika perjanjian tidak tercapai, Google dan Facebook dipaksa membayar biaya wajib kepada penerbit media berita melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Australia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan keadilan serta memberikan perlindungan hukum atas hak cipta penggunaan konten berita penerbit media berita. Untuk itu maka pemerintah Australia menghukum perusahaan teknologi yang melanggar hak cipta penerbit media berita. Apabila kedua perusahaan teknologi tersebut tidak mematuhi regulasi pembayaran royalti yang ditetapkan kebijakan tersebut, mereka dapat menghadapi sanksi atau denda yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, transparansi pembayaran dan pendapatan monetisasi konten penerbit media berita. Melalui regulasi dan kebijakan ini, pemerintah Australia mewajibkan kedua platform digital tersebut untuk mempublikasikan informasi yang jelas mengenai mekanisme serta jumlah pembayaran diberikan kepada penerbit media berita. Hal ini bertujuan untuk memberikan visibilitas yang jelas bagi penerbit media berita atas hasil kerja yang diapresiasi oleh kedua platform digital tersebut. Lebih jauh,

kebijakan ini menuntut adanya transparansi dari kedua platform digital tersebut dalam hal pemberian akses dan dukungan kepada penerbit media berita demi memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari penggunaan konten berita. Transparansi juga diperlukan dalam proses perundingan pembayaran antara Google, Facebook, dan penerbit media berita sehingga memungkinkan adanya tanggapan dan penilaian yang jelas terhadap tawaran atau kesepakatan yang diajukan. Melalui mekanisme transparansi, pemerintah Australia berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil bagi penerbit media berita serta mendorong tindakan yang bertanggung jawab dalam hal pembayaran dan penggunaan konten berita oleh Google dan Facebook.

Terakhir, kompensasi keuangan atas penggunaan konten penerbit media berita. Melalui regulasi dan kebijakan ini, pemerintah Australia memberikan ruang negosiasi di antara para pihak menyangkut besaran kompensasi keuangan atas penggunaan konten berita oleh Google dan Facebook demi mengurangi ketimpangan pendapatan. Lebih jauh, kebijakan ini mencakup pengaturan penyelesaian sengketa antara perusahaan teknologi dengan penerbit media berita. Pemerintah Australia menetapkan mekanisme arbitrase independen yang akan menentukan jumlah pembayaran yang adil kepada penerbit media berita jika tidak ada kesepakatan langsung di antara para pihak. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penerbit media berita dan memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual ditegakkan secara efektif (Flew et al., 2023; Lee & Molitorisz, 2021; Packham, 2020).

Untuk memastikan kepatuhan Google dan Facebook atas regulasi dan kebijakan *publisher rights*, *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) selaku badan regulasi media Australia melakukan supervisi pelaksanaan kebijakan ini dan menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua platform digital tersebut. ACMA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerbit media berita

dan platform digital mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Pemerintah menilai Google dan Facebook menggunakan konten penerbit media berita untuk menjaga agar platform mereka tetap menarik bagi pengguna sehingga penerbit media berita harus mendapatkan keuntungan timbal balik secara adil yang sesuai dengan nilai ekonomi yang dihasilkan dari konten mereka (BBC News, 2021a; Packham, 2020).

Kelangsungan Industri Media Berita Australia

Industri media berita Australia menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir karena perubahan perilaku konsumen yang beralih dari media berita tradisional ke platform digital akibat adopsi teknologi digital. Alhasil, Google dan Facebook menjelma menjadi platform digital utama yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan berbagi konten berita. Situasi ini menempatkan kedua platform digital tersebut sebagai pemain tunggal dalam distribusi dan konsumsi berita daring sehingga memiliki kekuatan besar dalam menentukan bagaimana berita disajikan dan dikonsumsi. Namun, kehadiran Google dan Facebook dalam industri media Australia berdampak negatif karena mengambil sebagian besar porsi pendapatan iklan digital yang berimbas pada berkurangnya pendapatan tradisional yang diperoleh oleh penerbit media berita akibat penurunan pendapatan iklan, pembelian konten, dan langganan (CBC News, 2021c).

Algoritma yang digunakan oleh Google dan Facebook untuk menghadirkan berita dan konten media kepada pengguna menghasilkan pendapatan iklan yang signifikan bagi kedua platform digital tersebut. Di sisi lain, penerbit media berita Australia menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang setara karena sebagian besar konten mereka dapat diakses secara gratis melalui kedua platform digital tersebut. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara platform digital dan penerbit media berita. Akibatnya, penerbit media berita

kehilangan pendapatan serta kesulitan untuk bertahan dan menghasilkan konten berita berkualitas. Situasi semacam ini berdampak negatif karena mengancam ekosistem penerbitan berita yang berkelanjutan di era digital (Bailo et al., 2021; BBC News, 2020).

Kebijakan *publisher rights* menjadi langkah solutif pemerintah Australia demi memastikan kelangsungan industri media berita di tengah perubahan paradigma konsumsi informasi serta persaingan dengan platform digital besar seperti Google dan Facebook. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan sumber pendapatan tambahan bagi penerbit media berita melalui mekanisme pembayaran kompensasi atas penggunaan konten berita yang dihasilkan sehingga mampu bertahan dan produktif dalam menyajikan konten dan layanan jurnalisme yang akurat dan berkualitas (Flew, 2023; Flew et al., 2023).

Sejak diberlakukan oleh pemerintah Australia pada 25 Februari 2021, baik Google maupun Facebook secara simultan menentang keras pemberlakuan kebijakan *publisher rights*. Mereka mengklaim kebijakan tersebut memberatkan secara finansial serta membatasi kebebasan dalam menampilkan konten berita. Kedua platform digital tersebut bahkan menolak secara tegas untuk membayar penerbit media berita Australia atas penggunaan konten berita yang ditampilkan di platform mereka. Namun, Google dan Facebook berbalik arah mengubah sikap dan kebijakan serta bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Australia dan penerbit media berita demi menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Morrison, 2021).

Google dan Facebook membuat kesepakatan dengan berbagai penerbit media berita Australia untuk membayar royalti atas penggunaan konten berita di platform kedua raksasa teknologi tersebut. Google meluncurkan Google News Showcase dan Discover yang merupakan program berita berbayar yang memberikan royalti kepada penerbit media berita yang berpartisipasi dalam program ini. Hal ini menandai perubahan besar dalam sikap dan kebijakan Google terhadap kebijakan *publisher rights*

Australia. Sementara itu, Facebook menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi dengan penerbit media berita Australia untuk membayar royalti atas penggunaan konten berita setelah memblokir sejumlah situs berita di platform digital perusahaan teknologi tersebut. Perubahan sikap dan kebijakan Google dan Facebook terhadap kebijakan *publisher rights* Australia merupakan imbas dari tekanan pemerintah Australia, penerbit media berita News Corp Australia dan Nine Entertainment, dan kesadaran kedua raksasa teknologi tersebut menyangkut pentingnya memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik konten berita (CBC News, 2021b; Khadem, 2020).

Perubahan sikap dan kebijakan Google membayar royalti kepada penerbit media berita Australia ditujukan sebagai upaya untuk memelihara hubungan baik dengan pihak berwenang serta menghindari kemungkinan sanksi. Kesepakatan ini diharapkan sebagai solusi atas konflik kepentingan antara Google selaku platform digital dan penerbit media berita Australia mengenai kerugian akibat penggunaan konten berita tanpa izin dan pembayaran kompensasi yang adil. Selain itu, pembayaran royalti ini ditujukan untuk memperbaiki reputasi di mata publik serta meningkatkan kredibilitas sebagai platform digital yang mendukung kelangsungan industri media berita Australia. Lebih jauh, menurut Google, pembayaran royalti merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang semakin dipandang penting dalam dunia usaha saat ini serta berkontribusi dalam membantu penerbit media berita untuk terus berkembang dan memberikan informasi yang berkualitas. Pembayaran royalti juga membantu mengkatalisasi inovasi dan investasi dalam industri media berita yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan termasuk Google (Grueskin, 2022; Ingram, 2023).

Sementara itu, perubahan sikap dan kebijakan Facebook terkait pembayaran royalti kepada perusahaan penerbit berita Australia ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara Facebook dan penerbit media berita seiring konflik

kepentingan berkepanjangan menyangkut kerugian akibat penggunaan konten berita tanpa izin dan kompensasi yang adil. Kesepakatan ini juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan sanksi atau tindakan hukum yang merugikan bisnis Facebook di Australia. Lebih jauh, Facebook mengklaim pembayaran kompensasi bertujuan untuk memperkuat posisi tawar sebagai platform digital yang berkomitmen penuh mendukung kelangsungan industri media berita Australia serta sebagai wujud apresiasi atas kontribusi yang dihasilkan oleh penerbit media berita dalam menyebarkan informasi kepada para pengguna platform digital Facebook (CBC News, 2021b; Meade et al., 2021; Sims, 2022).

Alhasil, sejumlah penerbit media berita Australia memperoleh pembayaran royalti dari Google dan Facebook sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan konten berita setelah disepakati perjanjian kontrak kerja sama. Sederet perusahaan tersebut meliputi News Corp Australia, Nine Entertainment, Guardian Australia, Seven West Media (SWM), Australian Broadcasting Corporation (ABC), dan Country Press Australia (CPA). Di satu sisi, Google menyepakati kontrak pembayaran royalti berdurasi lima tahun. Sementara Facebook hanya menyepakati kontrak pembayaran royalti selama tiga tahun. News Corp Australia merupakan salah satu penerbit media berita terbesar di Australia yang menerbitkan berbagai surat kabar terkemuka seperti The Australian, The Daily Telegraph, dan Herald Sun. Melalui kontrak kerja sama yang dinegosiasikan, Google dan Facebook sepakat membayar royalti sebesar 50 juta USD per tahun kepada pihak News Corp Australia.

Sedangkan Nine Entertainment merupakan pemilik dari Sydney Morning Herald, The Age, dan The Australian Financial Review. Melalui negosiasi dengan pihak Google dan Facebook disepakati pembayaran royalti sebesar 36 juta USD per tahun. Sementara itu, Guardian Australia adalah cabang dari surat kabar Guardian yang berbasis di Inggris. Kedua raksasa teknologi tersebut sepakat membayar royalti sebesar 3,5 juta USD per tahun melalui kontrak kerja sama. Di satu sisi, SWM adalah

pemilik dari berbagai media cetak dan penyiaran di Australia, termasuk The West Australian dan Channel Seven. Kedua raksasa teknologi tersebut menyepakati pembayaran royalti SWM sebesar 30 juta USD per tahun. Di sisi lain, ABC adalah penyiaran publik Australia yang juga memiliki situs berita dan aplikasi berita. ABC menyepakati pembayaran royalti dengan kedua raksasa teknologi tersebut sebesar 12 juta USD per tahun. Terakhir, CPA merupakan konsorsium penerbitan berita yang menaungi sekitar 160 surat kabar regional di Australia. CPA memperoleh pembayaran royalti dari Google dan Facebook per tahun sekitar 22.000 – 44.000 USD tergantung pada ukuran dan jumlah berita yang dihasilkan (Australian Financial Review, 2022; BBC News, 2021c; CBC News, 2021a; Cheik-Hussein, 2021b; Grueskin, 2022; Meade, 2021a, 2021c, 2021d; Morrison, 2021; Taylor, 2021).

Pembayaran royalti oleh Google dan Facebook atas sederet penerbit media berita Australia merupakan manifestasi keberhasilan dari upaya pemerintah Australia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan konten berita di platform digital. Seiring perkembangan teknologi dan platform digital, penting bagi penerbit media berita memperoleh pengakuan dan kompensasi atas konten berita yang dihasilkan. Melalui pembayaran royalti oleh Google dan Facebook, hal ini dapat menjadi langkah awal bagi industri media berita Australia untuk lebih dihargai dan dilindungi hak-hak mereka dalam ekosistem digital yang terus berkembang sehingga memperoleh manfaat dari sisi peningkatan pendapatan bagi penerbit media berita. Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi antara penerbit media berita dan platform digital menjadi kunci bagi kesinambungan industri media berita di masa depan (BBC News, 2020; Bossio et al., 2022; Cheik-Hussein, 2021a).

Keberagaman Media Berita Australia

Meskipun menuai kontroversi dan polemik secara domestik di ranah publik Australia, kebijakan *publisher rights* penting diberlakukan demi mempertahankan

keberagaman media serta mencegah dominasi dan monopoli platform digital dalam industri media berita Australia. Pada dasarnya, keberagaman media merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan memiliki perspektif yang beragam. Hal ini penting dalam mencegah konsentrasi kekuasaan media yang terlalu besar pada beberapa perusahaan besar sehingga masyarakat dapat memiliki akses ke berbagai sudut pandang. Selain itu, konteks keberagaman dalam kebijakan ini melibatkan peran penting media dalam membentuk opini publik, menyajikan informasi yang akurat, dan mendorong demokrasi yang sehat. Lebih jauh, keberagaman media dalam kebijakan ini terkait dengan kebutuhan untuk memastikan kelangsungan industri media berita yang sehat dan beragam (BBC News, 2021a; Flew et al., 2023).

Kebijakan *publisher rights* mengakui pentingnya keberagaman media dalam mendorong persaingan, perspektif yang beragam, dan memberikan suara kepada pihak-pihak yang mungkin tidak terwakili dengan baik. Untuk memastikan kelangsungan industri media berita yang sehat dan beragam, kebijakan *publisher rights* memberikan peluang yang lebih besar bagi penerbit media berita kecil atau independen untuk memperoleh pendapatan dari *platform digital* besar seperti Google dan Facebook. Regulasi kebijakan ini mewajibkan platform digital memprioritaskan konten berita dari penerbit media berita Australia dengan penyaluran dana tambahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong keberagaman dalam penyajian berita dengan memastikan adanya alternatif dari penerbit media berita yang lebih kecil dan terpinggirkan (Flew et al., 2023; Hitch, 2020).

Google meluncurkan Google News Showcase untuk merespons kebijakan *publisher rights*. Program ini mengikutsertakan seluruh penerbit media berita Australia sehingga memungkinkan pengguna untuk membaca berita dari berbagai sumber. Sementara Facebook merilis program serupa, yakni Facebook News demi mengakomodasi keikutsertaan pelbagai penerbit media berita Australia. Melalui

kedua program ini, pengguna dapat menemukan dan membaca berita dari beragam penerbit media berita dan situs di platform digital Google dan Facebook, termasuk penerbit media berita kecil atau pers independen (*small publishers*) yang terdiri atas surat kabar regional di Australia. Hal ini memungkinkan pengguna mengakses informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan memiliki perspektif yang beragam demi memastikan kelangsungan industri media berita yang sehat dan beragam.

Dengan adanya pembagian pendapatan, diharapkan keberagaman media akan tetap terjaga karena penerbit media berita memiliki insentif untuk terus bertahan dan menghasilkan konten berkualitas yang berperan penting dalam demokrasi dan transfer informasi yang akurat. Konteks keberagaman media sangat penting karena memperhatikan masalah inklusi, keterwakilan, dan keberagaman dalam ekosistem media di tengah penurunan pendapatan iklan cetak koran dan stasiun televisi serta pergeseran ke arah platform digital yang berakibat pada penurunan jumlah jurnalis dan sumber daya media yang tersedia untuk melaporkan berita dan konten informatif secara luas (Flew et al., 2023; Grueskin, 2022).

ACCC selaku badan regulasi persaingan usaha dan perlindungan konsumen Australia bertanggung jawab dalam memastikan keberagaman media melalui pemberlakuan kebijakan *publisher rights*. Lembaga ini berperan penting dalam menegakkan regulasi dan kebijakan *publisher rights* demi membatasi dominasi perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook dalam industri media berita Australia. Lebih jauh, ACCC menyelidiki pelanggaran *antitrust* dan melacak praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh kedua perusahaan teknologi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari upaya perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan penerbit media berita serta mempromosikan persaingan yang sehat di pasar iklan digital demi menjaga keberagaman media dan keberlanjutan jurnalisme di Australia. Kepatuhan Google dan Facebook dalam memberlakukan regulasi dan kebijakan *publisher rights* menunjukkan keberhasilan pemerintah Australia dalam melestarikan keberagaman

media berita sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang demokratis dalam industri media berita di Australia (BBC News, 2020; Dwyer et al., 2023; Taylor & Meade, 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah Australia merilis kebijakan *publisher rights* melalui NMBC setelah memperoleh persetujuan Parlemen Australia guna merespons dominasi Google dan Facebook dalam industri media Australia. Dominasi kedua platform digital tersebut tercermin dari monopoli atas distribusi dan monetisasi konten berita serta pasar iklan digital di Australia. Pemerintah menilai model bisnis kedua platform digital tersebut mencerminkan praktik bisnis yang tidak adil dan mengancam kepentingan industri media berita Australia. Meskipun menuai polemik di ranah publik serta penolakan keras dari Google dan Facebook, pemerintah Australia bersikeras memberlakukan kebijakan ini. Pemerintah mengklaim pemberlakuan kebijakan tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara penerbit media berita Australia dengan Google dan Facebook.

Melalui NMBC, pemerintah berupaya membatasi dominasi kedua platform digital tersebut dengan cara menerapkan regulasi dan kebijakan atas kontrol distribusi dan monetisasi konten penerbit media berita, transparansi pembayaran dan pendapatan monetisasi konten penerbit media berita, dan kompensasi keuangan atas penggunaan konten penerbit media berita. Selain itu, kebijakan ini diberlakukan oleh karena berkurangnya pendapatan tradisional yang diterima penerbit media berita akibat penurunan pendapatan iklan, pembelian konten, dan langganan yang mengancam kelangsungan industri media berita Australia. Lebih jauh, adopsi kebijakan *publisher rights* disebabkan oleh kekuasaan media yang tersentralisasi pada Google dan Facebook yang mengancam keberagaman media berita Australia. Pemerintah berupaya agar masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai

sumber yang berbeda serta memiliki perspektif yang beragam dengan didukung oleh ekosistem industri media berita yang sehat dan demokratis.

BIBLIOGRAFI

- ABC News. (2019). Facebook and Google Market Power to be Subject to Digital Code of Conduct. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2019-12-12/federal-government-digital-regulation-facebook-google/11791998>
- Australian Financial Review. (2022). Google and Meta Win Support from Publishers Before Landmark Review. *Australian Financial Review*. <https://www.afr.com/companies/media-and-marketing/media-giants-flush-with-facebook-google-money-like-the-new-normal-20221111-p5bxml>
- Bailo, F., Meese, J., & Hurcombe, E. (2021). The Institutional Impacts of Algorithmic Distribution: Facebook and the Australian News Media. *Social Media + Society*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/20563051211024963>
- BBC News. (2020). News Publishers Fight Tech Giants for Better Deals. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/business-53858419>
- BBC News. (2021a). Australia News Code: What's This Row with Facebook and Google All About? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-australia-56107028>
- BBC News. (2021b). Facebook Blocks Australian Users from Viewing or Sharing News. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-australia-56099523>
- BBC News. (2021c). Google to Pay Murdoch's News Corporation for Stories. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/business-56101859>
- Bellanova, R., Carrapico, H., & Duez, D. (2022). Digital/Sovereignty and European Security Integration: An Introduction. *European Security*, 31(3), 337–355. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101887>
- Bossio, D., Flew, T., Meese, J., Leaver, T., & Barnett, B. (2022). Australia's News Media Bargaining Code and the Global Turn Towards Platform Regulation. *Policy & Internet*, 14(1), 136–150. <https://doi.org/10.1002/poi3.284>
- Brevini, B. (2023). Global Digital Lords and Privatisation of Media Policy: The Australian Media Bargaining Code. *Javnost: The Public – Journal of the European Institute for Communication and Culture*, 30(2), 268–283. <https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2207427>
- Calderaro, A., & Blumfelde, S. (2022). Artificial Intelligence and EU Security: The False Promise of Digital Sovereignty. *European Security*, 31(3), 415–434. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101885>

-
- CBC News. (2020). Australia to Reveal Legislation that Would Force Google and Facebook to Pay for News Content. *CBC*. <https://www.cbc.ca/news/world/australia-google-facebook-pay-journalism-1.5832879>
- CBC News. (2021a). Facebook Restricts Users, Publishers from Sharing News Content in Australia. *CBC*. <https://www.cbc.ca/news/science/australia-facebook-news-content-1.5917224>
- CBC News. (2021b). Facebook to Restore Australian News Pages After Deal Reached to Amend Proposed Law. *CBC*. <https://www.cbc.ca/news/world/facebook-ban-australia-1.5924076>
- CBC News. (2021c). Google Threatens to Pull Search Engine in Australia. *CBC*. <https://www.cbc.ca/news/science/google-australia-pay-news-content-1.5883418>
- Cheik-Hussein, M. (2021a). *Google Launches News Showcase as News Media Bargaining Code Stoush Continues*. <https://www.adnews.com.au/news/google-launches-news-showcase-as-news-media-bargaining-code-stoush-continues>
- Cheik-Hussein, M. (2021b). *Seven Closes Deals with Facebook, Google for News Payment*. <https://www.adnews.com.au/news/seven-closes-deals-with-facebook-google-for-news-payment>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Davis, L. (2004). Intellectual Property Rights, Strategy, and Policy. *Economics of Innovation and New Technology*, 13(5), 399–415. <https://doi.org/10.1080/1043859042000188683>
- Dwyer, T., Flew, T., & Wilding, D. (2023). Where to Next with Australia's News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code? *Communications*, 48(3), 440–456. <https://doi.org/10.1515/commun-2022-0100>
- Farrand, B. (2023). Regulating Misleading Political Advertising on Online Platforms: An Example of Regulatory Mercantilism in Digital Policy. *Policy Studies*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/01442872.2023.2258810>
- Farrand, B., & Carrapico, H. (2022). Digital Sovereignty and Taking Back Control: From Regulatory Capitalism to Regulatory Mercantilism in EU Cybersecurity. *European Security*, 31(3), 435–453. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2102896>
- Flew, T. (2023). *Australia's News Media Bargaining Code: A New Institutional Perspective*. *American Affairs Journal*. <https://americanaffairsjournal.org/2023/03/australias-news-media-bargaining-code-a-new-institutional-perspective/>

-
- Flew, T., Iosifidis, P., Meese, J., & Stepnik, A. (2023). Digital Platforms and the Future of News: Regulating Publisher-Platform Relations in Australia and Canada. *Information, Communication & Society*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2291462>
- Flew, T., & Wilding, D. (2021). The Turn to Regulation in Digital Communication: The ACCC's Digital Platforms Inquiry and Australian Media Policy. *Media, Culture & Society*, 43(1), 48–65. <https://doi.org/10.1177/0163443720926044>
- Glasze, G., Cattaruzza, A., Douzet, F., Dammann, F., Bertran, M.-G., Bômout, C., Braun, M., Danet, D., Desforges, A., Géry, A., Grumbach, S., Hummel, P., Limonier, K., Münßinger, M., Nicolai, F., Pétiñiaud, L., Winkler, J., & Zanin, C. (2023). Contested Spatialities of Digital Sovereignty. *Geopolitics*, 28(2), 919–958. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070>
- Grueskin, B. (2022). Australia Pressured Google and Facebook to Pay for Journalism, Is America Next? *Columbia Journalism Review*. https://www.cjr.org/business_of_news/australia-pressured-google-and-facebook-to-pay-for-journalism-is-america-next.php
- Heylen, K. B. (2023). Enforcing Platform Sovereignty: A Case Study of Platform Responses to Australia's News Media Bargaining Code. *New Media & Society*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1177/14614448231166057>
- Hitch, G. (2020). Facebook, Google to be Forced to Pay for News as Part of New Mandatory Code of Conduct to Support Traditional News Media. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2020-07-31/draft-mandatory-code-conduct-facebook-google-pay-for-news/12510776>
- Ingram, M. (2023). How Much Do Google and Meta Owe Publishers? Twelve Billion Dollars, a New Study Says. *Columbia Journalism Review*. https://www.cjr.org/the_media_today/google_meta_owe_publishers_columbia_study.php
- Khadem, N. (2019). Crackdown on Facebook, Google Looms as ACCC Hands Down Its Final Report into Digital Platforms. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2019-07-26/government-threaten-google-facebook-with-digital-regulation/11348858>
- Khadem, N. (2020). News Publishers Could Boycott Google and Facebook under ACCC Proposal. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2020-05-20/news-publishers-accg-google-and-facebook-boycott/12263776>
- Lee, K., & Molitorisz, S. (2021). The Australian News Media Bargaining Code: Lessons for the UK, EU and Beyond. *Journal of Media Law*, 13(1), 36–53. <https://doi.org/10.1080/17577632.2021.1963585>

-
- Lu, L. Y. Y. (2007). Protecting Intellectual Property Rights. *Research-Technology Management*, 50(2), 51–56. <https://doi.org/10.1080/08956308.2007.11657430>
- Meade, A. (2021a). ABC Does Deals with Google and Facebook that Could See Millions Spent on Regional News. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2021/may/26/abc-does-deals-with-google-and-facebook-that-could-see-millions-spent-on-regional-news>
- Meade, A. (2021b). Australia's News Media Code Reaches Parliament with Minor Tweaks Expected. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2021/feb/16/australias-news-media-code-reaches-parliament-with-minor-tweaks-expected>
- Meade, A. (2021c). Nine Agrees to Join Google News Showcase in Australia for Reported \$30m a Year. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2021/feb/17/nine-agrees-to-join-google-news-showcase-in-australia-for-reported-30m-a-year>
- Meade, A. (2021d). Seven West Media Signs Multimillion-Dollar Deal to Join Google's News Showcase. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2021/feb/15/seven-west-media-signs-multimillion-dollar-deal-with-google>
- Meade, A., Taylor, J., & Hurst, D. (2021). Facebook Reverses Australia News Ban After Government Makes Media Code Amendments. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2021/feb/23/facebook-reverses-australia-news-ban-after-government-makes-media-code-amendments>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Monsees, L., & Lambach, D. (2022). Digital Sovereignty, Geopolitical Imaginaries, and the Reproduction of European Identity. *European Security*, 31(3), 377–394. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101883>
- Morrison, S. (2021). Why Facebook Banned (and then Unbanned) News in Australia. *Vox*. <https://www.vox.com/recode/22287971/australia-facebook-news-ban-google-money>
- Neilson, T., & Heylen, K. (2023). Journalism Unions and Digital Platform Regulation: A Critical Discourse Analysis of Submissions to Australia's News Media Bargaining Code. *Media International Australia*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1177/1329878X231176583>
- Oberrecht, G. (1997). Intellectual Property Rights: The Software Market and Copyright Protection in Hungary. *The International Information & Library Review*, 29(2), 215–225. <https://doi.org/10.1080/10572317.1997.10762430>

-
- Packham, C. (2020). Australia to Make Facebook, Google Pay for News in World First. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-australia-media-regulator-idUSKCN24V3UP>
- Shadlen, K. C. (2007). Intellectual Property, Trade, and Development: Can Foes Be Friends?. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 13(2), 171–177. <https://doi.org/10.1163/19426720-01302003>
- Sims, R. (2022). The Logic Behind Australia's News Media Bargaining Code. *CEPR*. <https://cepr.org/voxeu/columns/logic-behind-australias-news-media-bargaining-code>
- Taylor, J. (2021). Guardian Australia Strikes Deal with Google to Join News Showcase. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/20/guardian-australia-strikes-deal-with-google-to-join-news-showcase>
- Taylor, J., & Meade, A. (2020). Google and Facebook to be Forced to Share Revenue with Media in Australia under Draft Code. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/media/2020/jul/31/google-and-facebook-to-be-forced-to-share-revenue-with-media-in-australia-under-acccs-draft-code>
- Zhang, C., & Morris, C. (2023). Borders, Bordering and Sovereignty in Digital Space. *Territory, Politics, Governance*, 11(6), 1051–1058. <https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2216737>